

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, Perusahaan milik Negara/Daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya seperti Yayasan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas, seperti upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan puskesmas yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan ( Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 16).

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar informasi laporan

keuangan tersebut bisa bermanfaat bagi penggunanya maka harus memenuhi kualitas tertentu karena laporan keuangan yang berkualitas merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Laporan keuangan yang berkualitas yaitu seperti yang di syartkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Fungsi SAP yaitu sebagai landasan hukum pemerintah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara efektif, efisien dan dapat di pertanggungjawabkan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk entitas sektor publik seperti Rumah Sakit dan puskesmas-puskesmas yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di indonesia.

Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 121 menjelaskan bahwa entitas pemerintah yang berstatus BLUD wajib menyusun laporan keuangannya seperti laporan keuangan neraca, realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki

daya banding yang tinggi. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis full accrual mulai diterapkan di seluruh entitas pemerintah pada tahun 2015

Dalam penyusunan keuangan suatu entitas misalnya puskesmas, selain harus sesuai standar yang berlaku tentunya harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam akuntansi dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan SAP untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan suatu entitas yang berkualitas.

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu entitas untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu entitas dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki SDM sendiri maka penerapan SAP tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu proses tingkat kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya dengan benar dan kemampuan dalam memiliki keunggulan yang didasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan, 2017:244). Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya dan memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Sumber daya yang kompeten yang didukung dengan latar belakang oleh pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan keuangan daerah yang baik (Warisno, 2008). Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Tingkat pendidikan sering kali menjadi tolak ukur seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitasnya. Seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dengan tingkat pendidikan yang memadai, pengalaman didalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Dengan begitu seseorang akan semakin memahami tentang tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dari sumber situs ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), diakses tanggal 17-04-2016 ) bahwa BPK mengungkapkan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan dibidang akuntansi di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), masih banyaknya permasalahan di puskesmas mengenai lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan fenomena lainnya yang terjadi yaitu pelaporan keuangan puskesmas yang belum disusun dengan baik menjadi penghambat dalam pengelolaan puskesmas, ketersediaan SDM yang belum kompeten dalam bidang akuntansi yang menangani pelaporan keuangan puskesmas, masih kurangnya pelatihan dibidang keuangan, dan belum diterapkannya SAP berbasis akrual di puskesmas. ([www.bpkp.co.id](http://www.bpkp.co.id), diakses tanggal 09-09-2016).

Fenomena-fenomena yang terjadi didalam laporan keuangan seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi atau yang berlatar belakang akuntansi menjadi faktor penghambat didalam pembuatan laporan keuangan puskesmas. Puskesmas yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar penyelenggara puskesmas dianggap mampu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap puskesmas harus menjalankan kewajibannya dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena banyak pihak yang membutuhkan atau mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh puskesmas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa orang dengan berbeda-beda tempat penelitian.

**Tabel 1.1**

**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Judul (Peneliti, tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. (Denny Delyar AS, 2016)	kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh signifikan terhadap pembuatan laporan keuangan yang berkualitas	2 variabel
2.	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Agum Gumelar, 2017)	sumber daya manusia yang berkualitas dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap pembuatan laporan keuangan yang	Tempat penelitian

		berkualitas, tetapi sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.	
3.	Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. (Rukmi Juwita, 2013)	implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh signifikan terhadap pembuatan laporan keuangan yang berkualitas	Tempat penelitian dan variabel X2
4.	Kualitas Informasi Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik. (Marsdenia, 2016)	Faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan pengendalian intern dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Jumlah variabel
5.	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. (Surya Aditama, 2017)	penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh signifikan terhadap pembuatan laporan keuangan yang berkualitas	Jumlah variabel dan tempat penelitian

(Sumber: diolah penulis, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 maka peneliti ingin mengkaji ulang hasil penelitian tersebut dengan tempat penelitian yang berbeda. Oleh sebab itu, peneliti perlu mencari bukti empiris terhadap kompetensi SDM dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan di Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat puskesmas yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan atau akuntansi.
2. Didalam pembuatan laporan keuangan belum sepenuhnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.
3. Dibeberapa puskesmas masih terdapat permasalahan mengenai lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Bagian pengelolaan keuangan puskesmas belum sepenuhnya memahami mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas.
5. Pengelolaan keuangan puskesmas yang belum dikelola dengan baik menjadi penghambat didalam kegiatan dan didalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi?
2. Sejauhmana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.



3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas di wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya :

##### **a. Pengembangan Ilmu Akuntansi Pemerintah**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengembangkan ilmu akuntansi pemerintah khususnya mengenai standar pelaporan keuangan puskesmas, agar ilmu yang dikembangkan bisa mudah dipahami dan diterapkan secara lebih efektif dan efisien oleh puskesmas.

##### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan puskesmas dan dapat mengembangkannya kedalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kualitas laporan keuangan khususnya mengenai kompetensi SDM beserta standar akuntansi pemerintahannya.

**2. Kegunaan Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya :

a. Bagi Penyelenggara Puskesmas

Sebagai bahan masukan didalam pengambilan keputusan kemajuan puskesmas, bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggara puskesmas terutama dalam bidang akuntansi dan penerapan SAP supaya lebih efektif dan efisien sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan mengenai kompetensi SDM bidang akuntansi dan penyuluhan mengenai standar pelaporan keuangan puskesmas dalam rangka pembinaan terhadap puskesmas.